

Evaluasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* dengan Pendekatan *Human Organization Technology Fit Model* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Raisa Nur Adila¹, Neneng Dahtiah²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail: raisa.nur.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail: neneng.dahtiah@polban.ac.id

ABSTRAK

Transparansi dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi hal yang penting agar masyarakat mengetahui pencapaian setiap instansi pemerintah. Sistem *e-Budgeting* hadir dalam sektor pemerintahan sebagai perwujudan dari adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesuksesan penerapan sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data subjek. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat yang seluruhnya dijadikan sampel jenuh. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model *Human Organization Technology Fit* (HOT-Fit). Teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan alat bantu statistika SmartPLS versi 3.0. Hasil pengujian *Inner model* menunjukkan 3 dari 9 hipotesis tidak terbukti, di antaranya adalah variabel Kualitas Sistem yang tidak berpengaruh terhadap variabel Penggunaan Sistem, variabel Kualitas Sistem yang tidak berpengaruh terhadap variabel Kepuasan Pengguna dan variabel Kualitas Layanan yang tidak berpengaruh terhadap variabel Kepuasan Pengguna. Meski begitu, secara umum penerapan sistem *e-Budgeting* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan berhasil dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci

Transparansi, *E-Budgeting*, HOT-Fit Model

1. PENDAHULUAN

Di era *digital* ini, teknologi telah berkembang pesat pada berbagai aspek. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang termasuk turut membawa perubahan bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. Gunawan (2016) menjelaskan bahwa *e-Government* merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri [1].

Kehadiran *e-Government* telah membantu pemerintah dapat meningkatkan mutu pelayanan publik sehingga terselenggara pemerintahan yang bersih, transparan dan bisa menjawab tuntutan

perubahan secara efektif. Penerapan *e-Government* di Indonesia tidak hanya dilakukan di level pemerintah pusat namun penerapannya juga sudah dilakukan di level pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi atau otonomi daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien kepada setiap lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan transparansi agar masyarakat mengetahui pencapaian setiap instansi pemerintah salah satunya adalah transparansi mengenai keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [2]. *E-Budgeting* hadir dalam sektor pemerintahan sebagai perwujudan dari adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Nasution (2015) menjelaskan bahwa *e-Budgeting* atau penganggaran secara elektronik merupakan suatu sistem penganggaran berbasis web atau aplikasi program yang berguna untuk memfasilitasi proses penganggaran daerah [3]. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang

diperlukan dalam proses penyusunan anggaran karena dilakukan secara *online* dan dapat diakses di mana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses penyusunan anggaran. Selain itu, prosedur dalam *e-Budgeting* juga dapat mengantisipasi potensi adanya *mark-up* atau kecurangan terhadap penyusunan anggaran dengan adanya sistem saling mengawasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai menerapkan sistem *e-Budgeting* sejak akhir tahun 2017. Pada awalnya, sistem *e-Budgeting* merupakan sistem yang terpisah namun sejak tahun 2019, sistem *e-Budgeting* sudah terintegrasi dengan sistem *e-Planning* atau sistem perencanaan dalam aplikasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Si Rampak Sekar.

Melalui penerapan *e-Budgeting*, penyusunan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien karena semua data dan informasi yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terinput dalam sistem *digital*. Kehadiran *e-Budgeting* berdampak pada tidak adanya lagi program yang muncul tanpa rencana sehingga sistem tersebut memberikan suatu proteksi dan pengawasan untuk merencanakan program dengan baik. Meski begitu, masih terdapat beberapa kelemahan yang dirasakan oleh *user* dari sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kelemahan tersebut bersifat teknis dan nonteknis. Kelemahan teknis dari sistem *e-Budgeting* adalah *server* dari sistem *e-Budgeting* seringkali mengalami kegagalan sehingga tidak dapat diakses (*server down*) disebabkan membludaknya pengunjung situs *web*. Hal ini dapat terjadi karena waktu untuk menginput anggaran dibatasi sehingga semua perangkat daerah membuka aplikasi secara bersamaan dan menyebabkan *server down*.

Selain itu, terdapat pula kendala yang bersifat nonteknis pada penerapan sistem *e-Budgeting* yaitu dari aspek metode atau cara dalam menginput anggaran. Dalam proses *input* anggaran, *user* diharuskan menginput data yang sudah pasti baik dari jenis barang maupun nominalnya. Hal ini terkadang menyulitkan dikarenakan belum adanya standarisasi dan tidak semua komponen sudah tersedia dalam aplikasi. Komponen ini sudah diupayakan dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, namun masih terdapat beberapa komponen yang belum tersedia dalam aplikasi sehingga setiap OPD harus mengusulkan komponen untuk dapat menyusun anggaran yang dibutuhkan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat masih terus melakukan penyempurnaan sistem *e-Budgeting* agar dapat diterapkan secara penuh dan terbuka bagi publik

pada tahun 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem *e-Budgeting* untuk melihat sejauh mana kesuksesan penerapan sistem tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi suatu sistem adalah dengan menggunakan model evaluasi sistem informasi yaitu *Human Organization Technology Fit (HOT-Fit) Model*. Untuk mengukur keberhasilan penerapan sistem *e-Budgeting* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan komponen yang ada pada *HOT-Fit Model* yaitu *human* (penggunaan sistem, kepuasan pengguna), *organization* (struktur organisasi, kondisi fasilitas, dukungan pimpinan), *technology* (kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan) dan kesesuaian ketiga faktor tersebut dalam mempengaruhi manfaat sistem (*net benefits*). Meski pada mulanya model evaluasi *HOT-Fit* diperuntukkan untuk mengevaluasi sistem informasi kesehatan, namun pada perkembangannya, model evaluasi ini juga digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi lainnya seperti yang dilakukan oleh Mulyadi (2017) dalam mengevaluasi sistem informasi persediaan (SIDIA) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor [4] serta Amerieska (2015) yang menggunakan model *HOT-Fit* dalam mengukur kinerja program *e-Tax* pada Pemerintah Kota Malang [5].

Masalah yang dapat diidentifikasi yaitu mengenai capaian penerapan sistem *e-Budgeting* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi mengenai tingkat keberhasilan sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan komponen yang ada pada *HOT-Fit Model* yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, kondisi fasilitas, struktur organisasi, dukungan pimpinan dan kesesuaian seluruh faktor tersebut dengan manfaat sistem.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sistem *e-Budgeting* serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang andal dan optimal serta terbuka bagi publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Umar (2015: 16) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang [6]. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari

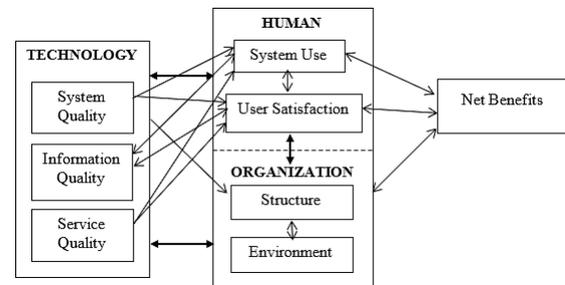
uang publik (Mardiasmo, 2005: 61) [7]. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah [8]. Mengacu pada pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan pedoman penyusunan APBD. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa pedoman penyusunan APBD meliputi: 1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; 2) Prinsip penyusunan APBD; 3) Kebijakan penyusunan APBD; 4) Teknis penyusunan APBD; dan 5) Hal khusus lainnya [9].

Menurut Hutahaean (2015:2), sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu [10]. Kemudian, Sutabri (2012:22) dalam bukunya yang berjudul Analisis Sistem Informasi mengemukakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan [11], dan O'Brien (2005:5) berpendapat bahwa sistem informasi adalah kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi [12].

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [13]. Sementara *e-Budgeting* atau penganggaran secara elektronik merupakan suatu sistem penganggaran berbasis web atau aplikasi program yang berguna untuk memfasilitasi proses penganggaran daerah (Nasution, 2015).

Wirawan (2011:7) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi [14]. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi adalah dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Yusof et al (2008) yaitu *Human Organization Technology Fit (HOT-Fit) Framework*. Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni Manusia (*Human*) yang terdiri atas variabel *System Use* dan *User*

Satisfaction, Organisasi (*Organization*) yang terdiri atas variabel *Organization Structure* dan *Organization Environment* serta Teknologi (*Technology*) yang terdiri atas variabel *System Quality*, *Information Quality* dan *Service Quality*. Variabel-variabel dalam model tersebut kemudian dihubungkan dengan variabel *Manfaat Bersih (Net Benefits)* dari sistem yang diteliti [15].



Gambar 1. Model Human Organization Technology (HOT) Fit (2008)

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Kualitas Sistem berpengaruh secara positif terhadap Penggunaan Sistem
- H₂ : Kualitas Sistem berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Pengguna
- H₃ : Kualitas Informasi berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Pengguna
- H₄ : Kualitas Layanan berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Pengguna
- H₅ : Kepuasan Pengguna berpengaruh secara positif terhadap Penggunaan Sistem
- H₆ : Struktur Organisasi berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Pengguna
- H₇ : Kepuasan Pengguna berpengaruh secara positif terhadap Manfaat Sistem
- H₈ : Kondisi Fasilitas berpengaruh secara positif terhadap Manfaat Sistem
- H₉ : Dukungan Pemimpin berpengaruh secara positif terhadap Penggunaan Sistem

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Survey dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang berupa opini dari responden yaitu *user* sistem *e-Budgeting* Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari jawaban kuesioner dan hasil wawancara serta data sekunder yang berupa dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat yang seluruhnya dijadikan sampel jenuh [16].

Instrumen penelitian yang berupa kuesioner terdiri

dari beberapa pernyataan mengenai indikator dari masing-masing variabel. Variabel penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen terdiri atas Penggunaan Sistem (PS), Kepuasan Pengguna (KP) serta Net Benefit (NB) yang dipengaruhi oleh enam variabel eksogen yaitu Kualitas Sistem (KS), Kualitas Informasi (KI), Kualitas Layanan (KL), Struktur Organisasi (SO), Kondisi Fasilitas (KF) serta Dukungan Pimpinan (DP).

Penelitian ini menggunakan model *HOT-Fit* yang dikembangkan oleh Yusof et al, dengan beberapa modifikasi untuk menilai keberhasilan penerapan sistem *e-budgeting*. Salah satunya adalah dengan menghilangkan variabel lingkungan organisasi (*organization environment*) karena variabel tersebut dinilai terlalu luas sehingga peneliti mengganti variabel lingkungan organisasi dengan kondisi fasilitas (*facilitating condition*) dan dukungan pimpinan (*top management support*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Abda'u (2018) [17]. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) karena PLS mampu memodelkan banyak variabel dependen dan independen secara kompleks.

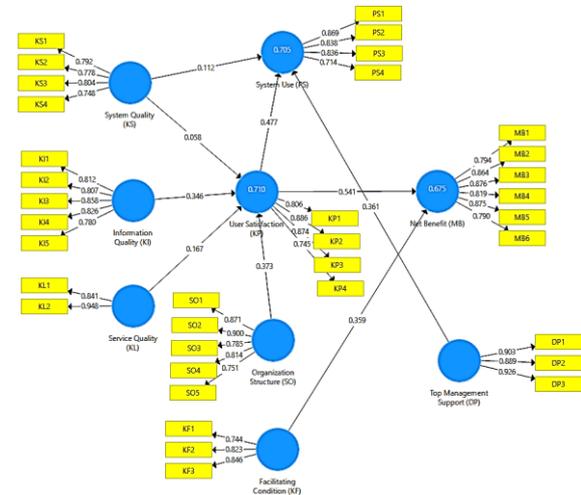
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan PLS yang dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

1. *Outer Model* (Model Pengukuran), yaitu model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten (konstruk) dengan indikatornya. *Outer Model* digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Sementara uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *cronbach's alpha* dan *composite reliability*.
2. *Inner Model* (Model Struktural), yaitu model yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya. Inner Model dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 untuk variabel endogen, nilai koefisien path atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural, serta dengan menggunakan parameter *original sample* untuk mengetahui sifat hubungan antarvariabel.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Abdillah dan Jogiyanto (2015:194) menyatakan bahwa *Outer Model* atau Model Pengukuran digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen yang terdiri atas Uji Validitas dan Uji Reliabilitas [18]. Berdasarkan uji validitas

konvergen, terdapat tiga indikator yang tidak memenuhi kriteria uji validitas konvergen yaitu KS5, KL3 dan PS5 sehingga ketiga indikator tersebut dihapus dari model dan menghasilkan nilai *outer loadings* yang seluruhnya berada di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan valid dan memenuhi validitas konvergen:



Gambar 2. Hasil Uji Validitas

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Pengukuran validitas diskriminan dapat dilakukan dengan menggunakan nilai konsistensi internal konstruk menurut Model Fornell Larcker (1981). Menurut Jogiyanto (2007:121), nilai-nilai konsistensi internal untuk seluruh konstruk penelitian harus melebihi angka 0,7 untuk dapat dikatakan seluruh konstruk dapat diandalkan.

Tabel 1. Nilai Konsistensi Internal Konstruk Menurut Model Fornell-Larcker

	KF	KI	MB	SO	KL	KS	PS	DP	KP
KF	0.806								
KI	0.711	0.817							
MB	0.706	0.744	0.854						
SO	0.674	0.705	0.843	0.856					
KL	0.635	0.698	0.543	0.600	0.896				
KS	0.576	0.771	0.701	0.657	0.595	0.780			
PS	0.671	0.746	0.811	0.821	0.636	0.667	0.866		
DP	0.700	0.728	0.695	0.704	0.584	0.639	0.737	0.906	
KP	0.649	0.783	0.766	0.765	0.672	0.678	0.755	0.611	0.830

Menurut tabel 1, seluruh nilai konsistensi internal konstruk yang dimiliki oleh setiap variabel laten pada model melebihi angka 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh konstruk dapat diandalkan.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur dan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite Reliability
KS	0,788	0,862
KI	0,876	0,909
KL	0,769	0,890
PS	0,833	0,900
KP	0,847	0,898
SO	0,877	0,916
KF	0,731	0,847
DP	0,891	0,932
MB	0,907	0,931

Berdasarkan tabel 2, nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability* yang dimiliki oleh seluruh konstruk berada di atas angka 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa model memiliki reliabilitas yang memadai.

Inner Model atau Model Struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan nilai R^2 untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel eksogen.

Tabel 3. Nilai *R Square*

Variabel	<i>R Square</i>
NB	0.663
PS	0.697
KP	0.717

Nilai R^2 merupakan nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel endogen yaitu NB, PS, dan KP secara berturut-turut memiliki nilai 0,663; 0,697; dan 0,717. Hal ini menandakan bahwa variabel KS dan DP mampu menjelaskan *variability* dari variabel PS sebesar 69,7%. Kemudian, variabel KS, KI, KL dan SO mampu menjelaskan *variability* dari variabel KP sebesar 71,7%. Terakhir, variabel KP dan KF mampu menjelaskan *variability* dari variabel NB sebesar 66,3%. Sisa dari *variability* yang tidak mampu dijelaskan oleh variabel-variabel laten termasuk ke dalam variabel lain atau lebih dikenal dengan istilah *error*.

Uji Hipotesis dilakukan dengan uji *t-statistic* yang bertujuan untuk menguji hubungan apakah variabel-variabel independen (eksogen) secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen (endogen). Pengujian hipotesis tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% ($\alpha=0.05$). Nilai *t*-tabel dengan tingkat signifikansi 95% adalah 1,96. Ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai *t*-tabel dan *t-statistic*. Jika *t-statistic* lebih tinggi dibandingkan nilai *t*-tabel, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Pada SmartPLS 3, untuk memperoleh hasil uji hipotesis dilakukan dengan *bootstrapping*.

Tabel 4. Ringkasan Hasil *Boostrapping*

Hipotesis	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KF -> MB	0.361	4.525	0.000
KI -> KP	0.364	3.877	0.000
SO -> KP	0.377	5.431	0.000
KL -> KP	0.159	1.810	0.071
KS -> PS	0.124	1.316	0.189
KS -> KP	0.055	0.529	0.597
DP -> PS	0.395	5.246	0.000
KP -> MB	0.532	7.279	0.000
KP -> PS	0.429	4.295	0.000

Berdasarkan hasil *bootstrapping* pada tabel 3, maka dapat disimpulkan hasil uji hipotesis dan pembahasan sebagai berikut:

1. Variabel KS tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel PS dikarenakan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 1,316 sehingga menunjukkan bahwa H_1 ditolak. Hal ini disebabkan oleh kualitas sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang mampu untuk mengakomodasi penggunaan dari sistem *e-Budgeting* di saat ketergantungan terhadap sistem *e-Budgeting* cukup tinggi seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengisian kuesioner dimana semua pekerjaan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran sangat bergantung kepada sistem *e-Budgeting* itu sendiri.
2. Variabel KS tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel KP dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,529 sehingga menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Hal ini dapat disebabkan karena kualitas sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memberikan kepuasan terhadap pengguna sistem *e-Budgeting* dikarenakan *server* dari *e-Budgeting* seringkali mengalami kegagalan akses ketika banyak *user* yang mengakses *website* untuk menginput data anggaran secara bersamaan.
3. Variabel KI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel KP. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *original sample* sebesar 0,364 serta nilai *t-statistic* sebesar 3,877 sehingga H_3 diterima. Hal ini disebabkan karena kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem *e-Budgeting* mampu memberikan kepuasan terhadap *user* atau pengguna sistem *e-Budgeting* dikarenakan informasi tersebut mampu memberikan kemudahan pada pengguna dalam melakukan tugas sehari-hari terkait penganggaran.
4. KL tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel KP dikarenakan memiliki nilai *t-statistic* sebesar 1,810 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Hal ini diakibatkan oleh kualitas layanan terkait penerapan sistem *e-Budgeting* tidak memberikan kepuasan terhadap pengguna sistem karena

fasilitas dan fitur yang ada pada sistem *e-Budgeting* belum mampu dalam mengakomodasi kebutuhan pengguna seperti belum adanya standarisasi dalam sistem *e-Budgeting* di mana beberapa komponen dalam menyusun anggaran belum tersedia sehingga membuat *user* kesulitan dalam menginput data dikarenakan harus membuat usulan komponen untuk dapat menginput anggaran.

5. Variabel KP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel PS. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *original sample* sebesar 0,429 dan nilai *t-statistic* sebesar 4,295 sehingga H_5 diterima. Hal ini dikarenakan sistem *e-Budgeting* membuat *user* atau pengguna *e-Budgeting* menerima dan memiliki keyakinan untuk terus menggunakan sistem tersebut.
6. Variabel SO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel KP yang ditunjukkan oleh nilai *original sample* sebesar 0,377 dan nilai *t-statistic* sebesar 5,431 sehingga dapat dinyatakan bahwa H_6 diterima. Hal ini dikarenakan implementasi sistem *e-Budgeting* telah direncanakan dengan baik oleh masing-masing manajemen OPD di Jawa Barat.
7. Variabel KP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel MB dikarenakan memiliki nilai *original sample* sebesar 0,532 dan nilai *t-statistic* sebesar 7,279 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_7 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna yang didapat dari sistem *e-Budgeting* sebagai sistem yang mampu memudahkan proses penganggaran setiap OPD di Jawa Barat berpengaruh terhadap manfaat-manfaat yang dirasakan oleh pengguna sistem.
8. Variabel KF berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel MB dengan nilai *original sample* sebesar 0,361 dan nilai *t-statistic* sebesar 4,525 yang menunjukkan bahwa H_8 diterima. Hal ini disebabkan oleh kondisi fasilitas yang menunjang penerapan sistem *e-Budgeting* mampu memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna sistem.
9. Variabel DP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel PS. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *original sample* sebesar 0,395 serta nilai *t-statistic* sebesar 5,246 sehingga dapat dinyatakan bahwa H_9 diterima. Hal ini dikarenakan dukungan dari pimpinan instansi mampu memudahkan implementasi dan penggunaan sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan mengenai evaluasi sistem *e-Budgeting* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kesuksesan penerapan sistem *e-Budgeting* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh kualitas informasi, kondisi fasilitas, kepuasan pengguna, struktur organisasi dan dukungan pimpinan.
2. Terdapat faktor-faktor yang tidak mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem *e-Budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu kualitas sistem dan kualitas layanan.
3. Terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki dari diterapkannya sistem *e-Budgeting* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu kualitas sistem serta kualitas layanan terkait sistem *e-Budgeting*.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pengembang dari sistem *e-Budgeting* diharapkan dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem *e-Budgeting* sehingga sistem menjadi semakin andal dan nyaman digunakan oleh *user* terlebih setelah sistem *e-Budgeting* terintegrasi dengan sistem *e-Planning*. Pengembangan atau peningkatan yang dilakukan dapat berupa meningkatkan desain sistem yang memadai dan melakukan *monitoring* secara berkala untuk meminimalisasi kegagalan akses atau *sever down* ketika pengunjung *website* membludak. Selain itu, cara lain untuk mencegah kegagalan akses adalah dengan menaikkan kapasitas atau spesifikasi dari *hosting* yang dimiliki oleh setiap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pihak pengembang sistem *e-Budgeting* juga dapat melakukan *upgrade* terkait fitur yang terdapat pada sistem *e-budgeting* seperti fitur yang berhubungan dengan komponen penyusunan anggaran sehingga *user e-Budgeting* yang terdapat pada setiap OPD tidak kesulitan untuk menginput anggaran yang belum tersedia komponennya. Selain itu, pihak pengembang juga diharapkan dapat membuat sarana *helpdesk* yang bisa membantu *user e-Budgeting* apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan sistem *e-Budgeting*.
2. Dikarenakan sistem *e-Budgeting* sudah terintegrasi dengan sistem *e-Planning* dalam satu aplikasi berbasis *online* yaitu Si Rampak Sekar yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka peneliti selanjutnya dapat menganalisis atau mengevaluasi aplikasi Si Rampak Sekar secara keseluruhan, bukan hanya evaluasi terhadap salah satu sistem saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gunawan, Dimas Rizky. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Ilmiah, 2016.

- [2] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [3] Nasution, Dito Aditia Darma Nasution, Puja Rizqy Ramadhan. Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 2019.
- [4] Mulyadi, Abdul Choliq. Penerapan Metode Human Organization Technology (HOT-Fit Model) untuk Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Persediaan (SIDIA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah*, 2017
- [5] Amerieska, Andi Kusuma Irawan. Pengukuran Kinerja Program E-Tax Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- [6] Umar, Husein. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [7] Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [9] Daerah. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
- [10] Hutahaean, Jeperson. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- [11] Sutabri, Tata. Analisis Sistem Informasi. Jakarta: Andi Publisher, 2012.
- [12] O'Brien, James A. Pengantar Sistem Informasi. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- [13] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- [14] Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- [15] Yusof, Maryati Mohd., Jasna Kuljisb, Anastasia Papazafeiropouloub, Lampros K. Stergioula. An evaluation framework for Health Information Systems: human, organization and technology-fit factors (HOT-fit). *Jurnal Ilmiah*, 2008.
- [16] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung : Alfabeta, 2015.
- [17] Abda'u, Wing Wahyu Winarno, Henderi. Evaluasi Penerapan SIMRS Menggunakan Metode Hot-Fit Di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. *Jurnal Ilmiah*, 2018.
- [18] Abdillah, Willy and Hartono, Jogiyanto. Partial Least Square (PLS) - Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta : Andi, 2015.